

Sudaryono

Paradigma Lokalisme dalam Perencanaan Spasial

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 17/No. 1, April 2006, hlm.28-38

PARADIGMA LOKALISME DALAM PERENCANAAN SPASIAL

Sudaryono

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan

Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

sudaryono_sastrosasmito@yahoo.com

Abstract

This article attempts to offer the paradigm of localism as an umbrella for spatial planning. It emphasizes that today; in the practical world of planning works in Indonesia there is a strong need to take local values (to include social, cultural, and local politics) as basis for spatial planning. Six planning parameters are proposed to bring the paradigm into the real world, they are: (i) the radius of uniqueness (ii) spatial existence, (iii) spatial defense, (iv) local community strengthens (v) local solution, and (vi) moral obligation of planner.

Keywords: *localism, spatial planning, local uniqueness, local politics, spatial security, moral obligation.*

I. LOKALISME: PENTINGNYA BUDAYA DAN POLITIK LOKAL DALAM PERENCANAAN SPASIAL

Sejarah telah mencatat bahwa pada tataran teoritik, pendekatan deterministik-rasionalistik dalam perencanaan kota dan wilayah telah banyak menuai kritik dan pada akhirnya dinyatakan gagal. Letak kegagalan yang paling menonjol adalah pada ketidak mampuannya mengakomodasi nilai-nilai pluralisme dan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak pada skala komunitas dan lokal. Namun, ironisnya, pada tingkat praksis pendekatan ini masih digunakan sampai saat ini. Tonggak sejarah yang ditancapkan oleh Permendagri No.4 tahun 1980 (yang berinduk pada paradigma *rational-comprehensive planning*, dan belakangan sudah berubah nomor dan tahun yang menyusulnya) dan telah menggantikan SVV dan SVO (produk dari paradigma *engineering* positivistik), secara paradigmatis dan konseptual ternyata masih belum tergeserkan oleh paradigma dan konsep-konsep baru (*plural planning*) yang dalam 15 tahun terakhir ini datang dan bermunculan.

Otonomi daerah yang konon dipercaya sebagai tulang punggung bagi tegaknya praktek-praktek dari paradigma dan konsep-konsep perencanaan baru, ternyata membentur pada kenyataan yang jauh dari harapan, bahkan terpuruk menjadi sekedar justifikasi dari pendekatan-pendekatan pragmatis-kapitalistik yang

berorientasi jangka pendek dan di banyak kasus cenderung destruktif. Situasi yang demikian, kadang mendatangkan rasa pesimistik di kalangan para praktisi maupun akademisi: masihkah ilmu perencanaan memiliki kapasitas kontributif terhadap perubahan-perubahan bangsa ini kedepan di tengah-tengah hiruk-pikuknya kekuatan-kekuatan hegemonik ekonomi raksasa yang menentukan? Apakah ilmu perencanaan telah direndahkan seperti observasi yang telah dilakukan oleh Lai (2005) sebagai berikut:

"In the old days of utopias, garden cities, new towns, and master planning, there was great faith in the creativity and acceptance of the planner as an artist and philosopher-king. Today, the planner has lowered himself or herself to the level of an advocate for other's values, a broker of interest, or a property manager" (Lai, 2005:14).

Nampaknya kegagasan seperti ini tidak hanya dihadapi oleh para pakar dan praktisi di negeri ini. Hasil analisis komparatif yang dilakukan oleh Thornley (1996) atas model pembangunan di Inggris (neoliberal-sentralistik-Tacherism) dan model pembangunan di Swedia (corporate pluralism-participatory-desentralistik) telah menunjukkan hasil yang sama, yakni setelah satu dekade praktikum dengan kedua model yang berbeda tersebut, kedua negara mengalami kesulitan ekonomi fiskal yang sama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dua ideologi yang berbeda, dua pendekatan yang berbeda, dan dua model pembangunan yang berbeda dapat berakhir pada satu kondisi yang sama? Nampaknya letak kegagalan dari kedua model tersebut sama, yakni keduanya memiliki fokus dan respon pada satu hal yang sama yaitu *market competition* dan *global solution*. Dengan perkataan lain, walaupun kedua negara memiliki ideologi dan pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya menggunakan solusi yang sama, yakni solusi ekonomi kapitalistik-multi nasional. Ada anggapan bahwa ekonomi yang diciptakan oleh investasi nasional dan internasional merupakan obat mujarab bagi solusi ekonomi lokal.

Gambaran mengenai kegagalan solusi ekonomi kapitalistik-multinasional sebagai solusi ekonomi nasional dan lokal juga disampaikan oleh John Perkins (2004) dalam bukunya yang sangat terkenal: *Confessions of an Economic Hit Man*. Dalam bukunya tersebut, Perkins membuat banyak sekali pengakuan, salah satunya adalah sebagai berikut:

".....Today, a new \$1.3 billion, three hundred-mile pipeline constructed by an EHM-organized consortium promises to make Ecuador one of the world's top ten suppliers of oil to the United States. Vast areas of rain forest have fallen, macaws and jaguars have all but vanished, three Ecuadorian indigeneous cultures have been driven to the verge of collapse, and pristine rivers have been transformed into flaming cesspools. During this same period, the indigenous cultures began fighting back. For instance, on May 7, 2003, a group of American lawyers

representing more than thirty thousand indigenous Ecuadorian people filed a \$1 billion lawsuit against ChevronTexaco Corp.....Since 1970, during this period known euphemistically as Oil Boom, the official poverty level grew from 50 to 70 percent, under-or unemployment increased from 15 to 70 percent, and public debt increased from \$240 million to \$16 billion. Meanwhile, the share of national resources allocated to the poorest segment of the population declined from 20 to 6 percent" (Perkins, 2004:xviii).

Sebagai pelaku dari apa yang oleh Perkins disebutnya sendiri sebagai *dirty business*, maka diakuinya bahwa ekonomi kapitalistik internasional yang dia jalankan selama ini telah gagal dan meninggalkan 6 dosa besar, yakni: perusakan lingkungan, perusakan budaya lokal, peningkatan kemiskinan, peningkatan pengangguran, peningkatan hutang negara, dan penurunan perhatian alokasi sumberdaya untuk kelompok masyarakat miskin. Selain itu Perkins juga mengingatkan, bahwa situasi yang menekan tersebut pada akhirnya menjadi pemicu bagi bangkitnya kekuatan politik lokal.

Situasi yang digambarkan oleh Thornley diatas dan disangatkan oleh pengakuan dari Perkins mengingatkan kita pada situasi yang sama yang terjadi di negeri ini. Melalui undang-undang otonomi daerah, "seakan-akan", kita telah bergerak meninggalkan model pembangunan lama yang sentralistik dan menggantikannya dengan model pembangunan yang lebih lokal-otonomik. Namun, praktek yang terjadi tetap sama, atas nama PAD maka semua daerah memiliki semangat yang sama untuk menarik investasi-investasi nasional dan multi-nasional ke daerahnya masing-masing. Tidak nampak adanya upaya yang sungguh-sungguh dan menonjol untuk mencari solusi melalui pembangkitan dan penguatan ekonomi lokal yang langsung akan memberikan buah kesejahteraan kepada masyarakat banyak.

Pengecualian barangkali dapat disaksikan pada kasus Gorontalo, yang dengan penuh keberaniannya telah memilih pertanian jagung sebagai solusi ekonomi lokal Gorontalo. Secara ideologis, pendekatan dan model yang digunakan oleh Gorontalo menunjukkan bahwa Gorontalo lebih percaya pada kekuatan ekonomi lokal daripada investasi-investasi nasional dan multi nasional. Gorontalo percaya bahwa budaya lokal dan ekonomi lokal kalau digeluti secara sungguh-sungguh akan menjadi solusi lokal bagi persoalan-persoalan lokal. Hal ini mengingatkan kita pada upaya sungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh Thailand dengan model pembangunan yang terkenal dengan *one tambon one product* (satu kecamatan satu produk).

Dalam konteks perencanaan tata ruang (wilayah dan kota), hal yang sama juga terjadi. Pilihan-pilihan produk tata ruang yang dapat kita saksikan dalam lima tahun terakhir ini ternyata merupakan hasil kepanjangan tangan dari pendekatan-

pendekatan lama (pragmatik) yang dulu pernah menuai kritik. Walaupun dibungkus oleh praktek otonomi daerah, namun produk-produk tata ruang yang muncul di negeri ini adalah seragam; atas nama PAD maka tata ruang lalu hanya memihak pada ekonomi kapitalistik-nasional-multi nasional sebagai satu-satunya solusi yang mujarab. Otonomi daerah yang seharusnya menjadi kendaraan bagi penguatan eksistensi tata ruang lokal justru berbalik arah menjadi kendaraan bagi penggeseran dan pengusuran tata ruang lokal, yang kelak sedikit demi sedikit tentu akan menjadi pembunuh bagi kebudayaan lokal khususnya yang berbasis spasial. Hal yang menyakitkan adalah, bahwa tata ruang semacam itu senyatanya tidak sungguh-sungguh dibutuhkan oleh daerah dan juga jauh dari kalkulasi akal sehat ekonomi karena pangkal berpikir yang digunakan adalah spekulasi yang berpijak pada pasar semu. Dapat disaksikan bahwa banyak sekali produk-produk tata ruang semacam itu menjadi terbengkelai dan kosong dari aktifitas yang berarti atau tidak berfungsi secara maksimal. Menyakitkan, karena telah menjadi fakta terjadinya pemborosan tata ruang; menyakitkan, karena telah menjadi fakta penyempitan ruang gerak masyarakat lokal; dan menyakitkan, karena telah menjadi fakta bagi terjadinya perampasan hak hidup dan hak pengelolaan budaya lokal yang berbasis spasial. Dalam kerangka berpikir semacam itulah maka pentingnya muatan budaya lokal dan politik lokal dalam produk-produk perencanaan tata ruang menjadi sangat terasa sekali.

II. TELAAH KONSEPSUAL: BUDAYA DAN POLITIK LOKAL DALAM PERENCANAAN SPASIAL

Apa yang harus dilakukan oleh setiap kerja perencanaan keruangan (spasial) dalam kaitannya dengan budaya dan politik lokal? Apakah pluralisme budaya lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam setiap diskusi mengenai otonomi lokal benar-benar telah menjadi bagian penting dari politik lokal? Apakah gerakan-gerakan masa yang akhir-akhir ini menjadi trend baru bagi solusi konflik-konflik tata ruang merupakan dimensi empirik dari apa yang disebut sebagai politik lokal? Manakah yang benar: apakah budaya lokal yang menjelma menjadi kekuatan politik lokal, ataukah politik lokal yang menggunakan media budaya lokal untuk mendapatkan kekuatan legitimasinya? Lalu, bagaimanakah kerja perencanaan dalam berkomunikasi dan mengakomodasi keduanya?

Dalam pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh Perkins (2004) diatas memang antara ruang, budaya lokal, dan politik lokal saling teranyam atau saling tali temali satu terhadap lainnya. Apabila ruang dan budaya lokal dilukai, maka muncullah kekuatan politik lokal sebagai suatu gerakan praksis. Sebaliknya, apabila kesadaran politik atas jatidiri lokal dan keberlanjutan eksistensi ruang lokal serta sumberdaya lokal terbangun dengan baik, maka budaya lokal akan digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan kesadaran tersebut. Namun, sayangnya, yang terakhir ini jarang sekali terjadi: kesadaran yang

menuntun tindakan. Disinilah kemudian letak kerja perencanaan keruangan menjadi sangat penting dan signifikan, dengan tugas sucinya membangun kesadaran budaya, ruang, dan politik lokal bagi masyarakat lokal khususnya dan masyarakat dunia yang menaruh kepentingan terhadap keberlanjutan sumberdaya lokal. Dalam kerangka tersebut, maka ada 5 (lima) konsep yang sangat penting dan mendasar bagi kerja perencanaan semacam itu. Konsep-konsep tersebut adalah: (i) radius keunikan, (ii) eksistensi spasial, (iii) ketahanan spasial, (iv) penguatan komunitas lokal, dan (v) solusi lokal.

(i) Radius Keunikan

Radius keunikan merupakan suatu konsep yang menggambarkan hubungan skala vertikal dan horisontal dari suatu eksistensi ruang. Konsep ini menekankan radius rasa ruang dari suatu pengaruh eksistensi keunikan. Artinya, apabila ada suatu intervensi atau perubahan tata ruang terjadi pada radius ini, maka nilai ruang dari keunikan tersebut akan terusik bahkan akan tereduksi. Sebagai contoh, dalam penelitiannya dikawasan Padangsambian-Denpasar, Adnyana (2003) menemukan bahwa dibangunnya sebuah pabrik roti dan rumah bertingkat yang hanya beberapa meter saja berjarak dari Pura Dalem Kahyangan atau Kawasan Suci Pura dari suatu desa, pada akhirnya telah menurunkan respek atau rasa hormat dari masyarakat setempat terhadap para tokoh yang telah mengizinkan dibangunnya bangunan tersebut. Namun, karena masyarakat Bali sangat taat pada agama dan adat, maka kekecewaan tersebut tidak sempat mengemuka menjadi konflik-konflik yang terbuka. Kutipan wawancara yang dilakukan oleh Adnyana dibawah ini memberikan gambaran, bahwa radius keunikan Kawasan Pura Suci sudah dilukai.

"Iya.....setiap warga merasa keberatan. Tetapi kita mau apa, dia kan telah mendapat ijin. Ini jaman pembangunan. Saya kira mereka sudah bicara dengan ketua adat sebab setahu saya tidak boleh membangun di seputar pura.....tidak ada orang yang mau karena merupakan karang tenget. Tapi ia kan bukan orang Bali. Selain orang Bali, apa boleh? Adat sendiri melarang itu. Saya sungguh tidak mengerti sekarang banyak hal yang telah dilanggar" (Pernyataan GR dalam wawancara yang dilakukan oleh Adnyana, 2003:274).

Di Yogyakarta, pembangunan sebuah pusat perbelanjaan yang sangat besar yang telah tega memangkas salah satu bagian atap dan dinding *gandok tengen* dari satu bangunan warisan budaya (Pesanggrahan Ambarukmo), telah melecehkan dan melukai perasaan masyarakat Yogya yang tercermin dalam gerakan-gerakan 'penyapaan' dan 'pengingatan' terhadap tokoh-tokoh Yogya. Pembangunan mall tersebut yang menyusul dibangunnya Hotel Ambarukmo pada tahun 60-an, telah menjepit dan menenggelamkan keunikan Pesanggrahan

Ambarukmo baik secara vertikal maupun horisontal. Keunikan pesanggrahan yang dapat dinikmati dari jarak dan radius tertentu telah direduksi.

Hal yang sama kemudian berlanjut pada rencana pembuatan ruang parkir dan perbelanjaan di bawah alun-alun utara Kraton Yogyakarta, yang merupakan bagian dari inti keunikan Kraton. Inti keunikan kraton akan di bor (dilubangi), kemudian akan ditumpukkan fungsi-fungsi baru yang tidak ada kaitannya dengan penguatan keunikan kraton. Satu hal yang telah dilupakan oleh proyek raksasa ini adalah bahwa konsep keunikan merupakan bangunan dari tata ruang fisik, tata pikiran, tata citra, dan tata memori dari masyarakat Yogya mengenai Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Radius keunikan bukan sekedar radius fisik-keruangan belaka, melainkan menyangkut radius nilai, termasuk nilai spiritual dari suatu keunikan ruang. Radius keunikan ruang adalah juga melingkup radius alam pikiran. Alun-alun, sebagai kekayaan ruang lokal Yogyakarta, senyatanya telah hinggap dipikiran dan perasaan orang banyak, atau menjadi apa yang disebut oleh Rossi (1982) sebagai *collective memory*. Seorang tokoh spiritual Yogya pernah berniat melakukan *topo pepe* (bertapa berjemur dibawah terik matahari) sebagai tanda ketidaksetujuan terhadap rencana tersebut. Namun belakangan, niat tersebut diurungkan. Konon, *topo pepe* dilakukan sebagai media penyampaian aspirasi rakyat terhadap raja. Namun, sudah lama tradisi tersebut tidak pernah dilakukan lagi, sehingga niat dari seorang tokoh Yogya untuk *laku topo pepe* sungguh mengejutkan, namun menjadi fenomena menarik ditengah hiruk-pikuk pembangunan kota Yogya yang bergerak menuju sebuah kota yang berwajah moderen-kapitalistik.

(ii) *Eksistensi Spasial*

Eksistensi spasial berkaitan erat dengan peran dan posisi suatu unit keunikan ruang terhadap eksistensi-eksistensi ruang yang lain dan juga menyangkut kapasitasnya memanggil perhatian dan diperhatikan oleh masyarakat luas. Kapasitas memanggil dapat terbangun karena adanya keteranyaman yang kental dan rapat antara segitiga: ruang, aktifitas, dan sistem nilai. Ketiga unsur eksistensi spasial tersebut saling mengkait dan tidak dapat dipisahkan satu terhadap yang lain. Sebagai misal, apabila suatu ruang diciderai melalui pengusuran, penggeseran, ataupun penenggelaman (melalui hegemoni skalatis), maka tentu saja sistem aktifitas dan sistem nilai yang disandangnya akan tereduksi; contoh kongkrit dapat diamati di Bali pada kasus-kasus pembangunan hotel-hotel skala besar di kawasan-kawasan pantai Sanur dan Kuta. Diakui atau tidak, hegemoni hotel-hotel besar atas kawasan pantai Kuta dan Sanur tentu telah mereduksi konsentrasi ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat adat di sana.

Demikian juga sebaliknya, apabila keunikan aktifitas dari suatu unit spasial dilemahkan atau bahkan ditiadakan untuk digantikan dengan aktifitas profit skala besar, maka roh ruang atau nilai ruang akan hilang dan eksistensi spasial pada akhirnya akan menyusul hilang. Beberapa kasus diantaranya dapat diamati pada kasus-kasus penetrasi aktifitas komersial moderen dan perkantoran atas kawasan-kawasan hunian yang bernilai historis tinggi seperti yang terjadi di kawasan Bandung utara, Kota Baru di Yogyakarta, dan kawasan Semarang atas. Fenomena yang sama juga terjadi pada kasus-kasus pelemahan kegiatan pasar tradisonal oleh ekonomi skala besar (melalui proyek *land sharing*) dan peniadaan (melalui kebakaran dan diikuti dengan pemindahan) kegiatan-kegiatan kawasan pasar tradisional.

(iii) Ketahanan Spasial

Ketahanan spasial disatu sisi menyangkut apa yang disebut sebagai komitmen spasial, dalam pengertian keperdulian dari warga pemilik ruang atas teritori ruang hidupnya sangat tinggi serta terpelihara dan terwariskan dari generasi ke generasi secara baik. Mandelbaum (1988) menyebutnya sebagai *williness to offer* dalam suatu *unified system of social cooperation*. Sedangkan Jane Jacobs (1961) dalam karyanya yang sangat terkenal: "*The Death and Life of Great American Cities*" menyatakan bahwa kota-kota yang memiliki *city vitality* (saling keperdulian antar sesama warga) cenderung bertahan dan berkembang secara baik; salah satu contoh yang digambarkan olehnya adalah distrik North End di Boston. Dalam bahasa agak berbeda, namun dalam konteks substansi yang sama, pemikiran ini kembali disangatkan oleh Florida (2005) dalam kutipan berikut:

"The distribution of talent, or human capital, is an important factor in economic geograpy. Indded, it determines why some cities succeed and others declined..... Jane Jacobs long ago called attention to the role of cities in attracting and mobilizing talented and creative people..."(Florida, 2005:67).

Disisi lain, ketahanan spasial juga menyangkut keperdulian dari pihak penguasa atas keunikan spasial yang dimiliki oleh suatu unit ruang (kawasan), melalui tindakan-tindakan perlindungan dan pengendalian pembangunan yang ketat (*development control*). Dengan perkataan lain, ketahanan spasial, merupakan perpaduan antara kekuatan yang terbangun secara internal oleh masyarakat lokal atas ruang hidup dan kehidupannya dengan perlindungan yang diberikan oleh pemegang otoritas formal.

(iv) *Penguatan Komunitas Lokal*

Penguatan komunitas lokal merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan spasial dan eksistensi spasial. Penguatan komunitas lokal menyangkut upaya-upaya untuk melawan sisi-sisi yang melemahkan masyarakat seperti: kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga masyarakat terpuruk dalam satu situasi ketidak-berdayaan. Dalam situasi ketidak-berdayaan, masyarakat mudah sekali terkecoh oleh intervensi kapitalis besar untuk melepas hak atas tanah pada ruang dimana mereka hidup dan berkehidupan. Pada tahun 1994, suatu kelompok masyarakat di wilayah Kebonsirih Jakarta sangat menunggu kehadiran seorang konglomerat properti untuk menggusur permukimannya, dengan harapan akan mendapatkan uang penggusuran yang dapat memperbaiki taraf hidupnya. Dengan uang penggusuran, mereka dapat membangun rumah dengan luasan yang sama di daerah pinggiran Jabotabek dan memiliki sisa uang untuk modal usaha.

Penguatan komunitas lokal juga dapat dilakukan melalui apa yang oleh Friedmann (1992) disebutnya sebagai "pembebasan" dan "melawan pengucilan". Pembebasan mencakup upaya-upaya untuk lepas dari penindasan (misalnya penggusuran paksa), lepas dari kebodohan (melalui wajib belajar masyarakat), keluar dari keterbelakangan, dan pembebasan dari globalisasi yang merugikan (perdagangan besar modal asing yang mematikan perdagangan modal dan aktor lokal). Sedangkan melawan pengucilan meliputi upaya-upaya untuk keluar dari pengucilan ekonomi, seperti: pengucilan terhadap modal (karena tidak dipercaya dapat mengembalikan pinjaman bank), pengucilan terhadap teknologi (khususnya terhadap petani dan nelayan), dan pengucilan atas akses terhadap sumberdaya. Sedangkan upaya untuk keluar dari pengucilan politik meliputi upaya-upaya untuk melindungi minoritas dari kejahatan, ketakutan atau kesewenang-wenangan kelompok mayoritas, membebaskan masyarakat dari rasa takut, serta memberantas korupsi yang merajalela dan melembaga.

(v) *Solusi Lokal*

Diatas sudah disampaikan hasil studi dari Thornley (1996) yang menemukan, bahwa ketergantungan pada solusi-solusi tunggal dari *global solution* akan berakhir pada satu situasi kesulitan ekonomi yang sama (Inggris dan Swedia). Kita juga pernah menyaksikan bagaimana Indonesia bersama-sama dengan negara Asia yang lain (Malaysia, Thailand, dan Korea) terpuruk dalam kesulitan ekonomi yang sama karena pernah menggunakan model solusi yang sama dan meremehkan solusi-solusi lokal.

Otonomi daerah, seharusnya menjadi suatu model yang membangkitkan semangat baru untuk mencari solusi-solusi lokal bagi persoalan-persoalan lokal. Bukannya malah justru sebaliknya, menjadikan daerah menjadi sangat liberal

dan mempercayakan kekuatan-kekuatan luar dalam pilihan dan keputusan-keputusan yang menyangkut pembangunan daerah. Dalam lima tahun terakhir ini, rangan semangat yang berlebihan, daerah-daerah saling berlomba untuk menarik investasi nasional maupun internasional atas nama pengejaran terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ditengah-tengah hiruk pikuk seperti itu, keberanian dari Gorontalo untuk memilih pendekatan agropolitan yang berbasis pertanian jagung menjadi suatu keberanian yang langka dan pantas mendapat penghargaan. Demikian juga Klaten, yang konon pernah dipuji-puji oleh seorang Emil Salim karena begitu ragamnya solusi-solusi lokal yang telah dilakukan Klaten baik dalam hal solusi ekonomi maupun tata ruang. Di Klaten utara, solusi lokal yang menonjol dapat ditemukan pada tata ruang perikanan, pertanian padi sawah dan perkebunan tanaman keras; Klaten tengah dengan solusi tata ruang pertanian padi sawah; Klaten selatan memiliki solusi kerajinan dalam pola permukiman komunitas industri cor logam (Ceper), payung (Juwiring), tekstil (Wedi), gerabah (Bayat), dan wisata air (Jombor).

Dalam gambaran seperti diatas, maka tugas dan kewajiban dari setiap kerja perencanaan spasial harus mampu menemukan, membangkitkan, kemudian merumuskan solusi-solusi lokal kedalam setiap produk-produk perencanaan yang dihasilkannya dan memberikan pengawalan terhadapnya sampai menjadi suatu gerakan praksis yang konsisten. Pertanyaan yang muncul adalah, seperti apakah implikasi metodologisnya, dalam pengertian langkah-langkah apakah yang harus ditempuh oleh para perencana profesional untuk menemukan, membangkitkan, dan kemudian merumuskan solusi-solusi lokal yang dimaksud?

III. IMPLIKASI METODOLOGIS: EKSPLORASI DAN PEMBANGKITAN SOLUSI-SOLUSI LOKAL

Dalam rangka untuk menemukan, membangkitkan dan merumuskan solusi-solusi lokal bagi persoalan-persoalan tata ruang lokal, seorang perencana harus melakukan suatu kerja eksplorasi lapangan, melalui suatu pendekatan *inductive planning* (Sudaryono,2001). Secara metodologis, ada dua langkah penting yang harus dilakukan dalam suatu kerja eksploratif: (i) *grand tour*, dan (ii) *mini tour* (Spradley, 1997).

(i) Grand Tour

Grand tour, atau pengamatan menyeluruh bertujuan untuk menemukan unit-unit keunikan spasial dari suatu obyek keruangan yang akan direncanakan. Unit-unit keunikan merupakan hasil anyaman dari segitiga: ruang, sistem aktifitas manusia, dan sistem nilai yang hidup dan mengikat masyarakat. Unit-unit keunikan dapat ditemukan lewat kemiripan tanda-tanda fisik, keterulangan-keterulangan bentuk, kemiripan sifat atau fungsi ruang, dan kesamaan orientasi nilai masyarakatnya.

Produk dari *grand tour* ini berupa peta-peta unit keunikan beserta deskripsinya, yang memberikan gambaran topik perencanaan yang menonjol dari setiap unit keruangan.

(ii) *Mini Tour*

Mini tour, merupakan langkah lebih lanjut dari *grand tour* untuk melakukan pendalaman pada setiap unit-unit keunikan yang telah terbangun. Tujuan dari *mini tour* adalah untuk menemukan tema-tema keunikan yang menjadi isi dari setiap topik unit keunikan ruang. Tema-tema ini kemudian diperlakukan sebagai tema-tema perencanaan, dan perencana memiliki obligasi untuk memperkuat tema-tema tersebut melalui rumusan-rumusan rencananya. Dalam konteks ini, intervensi pemikiran-pemikiran preskriptif dari perencana harus dilakukan secara hati-hati untuk tidak mereduksi keunikan-keunikan yang dimiliki oleh setiap unit keruangan.

Produk dari langkah mini tour ini adalah berupa rencana detail unit keunikan ruang yang terdiri atas detail-detail: tata ruang, tata sumberdaya, tata infrastruktur, tata ekonomi, tata sosial, tata budaya, tata spiritual, dan tata pengendalian pembangunan.

(iii) *Obligasi Moral*

Tidaklah berlebihan apabila kita memberikan julukan “pejuang” dan “pembela” kearifan tata ruang lokal terhadap perencana-perencana profesional yang melakukan pendekatan perencanaan seperti yang telah dipaparkan diatas. Karena untuk melakukan pendekatan seperti itu, seorang perencana harus melakukan ”pendekatan hati” dan bukannya mengagungkan ”pendekatan rasio” saja. Pendekatan hati (terlibat dan merasakan), membawa konsekuensi pada keterlibatan moral seorang perencana terhadap unit keruangan yang dia rencanakan. Setiap goresan tinta yang keluar dari seorang perencana, merupakan persembahan kasihnya pada masyarakat dan tata ruang yang dia gumuli.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I Ketut, Puspa (2003). "Perubahan Pemanfaatan Ruang dalam Perspektip Masyarakat
Adat Bali: Studi Kasus Padangsambian Denpasar", disertasi dipertahankan di Universitas
Gadjah Mada 15 Maret 2003, tidak dipublikasikan, hal.271 -291.
Florida, Richard (2005). *Cities and the Creative Class*, Routledge, New York.
Friedmann, John (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*,
Blackwell Publishers, Cambridge.

- Fainstain, Susan S. (1996). *Readings in Planning Theory*, Blackwell Publishers Inc, Cambridge.
- Lai, Lawrence Wai-chung (2005). "Neo-Institutional Economics and Planning Theory", in *Planning Theory*, Volume 4 Number 1 March 2005.
- Mandelbaum, Seymour J.(1988)."Open Moral Communities", in Mandelbaum, Seymour J.,Mazza, Luigi, and Burchell, Robert W.(1996): *Explorations in Planning Theory*, New Jersey, Center for Urban Policy Research.
- Perkins, John (2004). *Confessions of an Economic Hit Man*, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Rossi, Aldo (1982). *The Architecture of the City*, the Institute for Architecture and Urban Studies, the Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.
- Spradley, James P.(1997)."Memahami Cara Hidup Orang Lain: Memperkenalkan Ilmu Etnografi", Pusat Pastorial Yogyakarta No.5 Seri Pastorial 277.
- Spradley, James P.(1997)."Mengamati Sambil Ikut Serta: Metode Observasi Partisipatif", Pusat Pastorial Yogyakarta No.6 Seri Pastorial 277.
- Sudaryono (2001)."Inductive Planning: Paradigma Baru Pendidikan Perencanaan di Indonesia", paper disampaikan dalam seminar Kontribusi Pendidikan Perencanaan Dalam Menunjang Otonomi Daerah, Asosiasi Sekolah Perencanaan, Semarang, 31 Maret, 2001.
- Thornley, Andy (1996)."Thatcherism and the Swedish Model: Center/Local Relationship in Urban Planning", in Mandelbaum, Seymour J.,Mazza, Luigi, and Burchell, Robert W.(1996): *Explorations in Planning Theory*, New Jersey, Center for Urban Policy Research.